



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI  
JAKARTA TAHUN 2021**

**LKIP 2021**  
**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah S.W.T. karena kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dengan baik.

LKIP Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

LKIP Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 melaporkan realisasi, hambatan dan upaya solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Disamping itu, LKIP tahun 2021 juga melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021, terhadap manfaat yang diterima oleh negara dan masyarakat.

Demikian Laporan ini dibuat dan kami berharap LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta



Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP. 197009241998032004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1. GAMBARAN UMUM .....	7
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA .....	9
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA .....	10
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP 2021 .....	11
1.5. SISTEMATIKA LKIP 2021 .....	12
<b>BAB II</b>	
<b>RENCANA STRATEGIS .....</b>	<b>14</b>
2.1. VISI DAN MISI .....	15
2.2. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI .....	18
2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 .....	24
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>65</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	66
1. TARGET CAPAIAN AKUNTABILITAS ORGANISASI .....	66
2. REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI .....	68
3. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA .....	84
4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	91
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	93
1. REALISASI ANGGARAN PER SKPD/UKPD DINAS PPKUKM TAHN 2021 ..	93
2. RELISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2021 .....	94
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Reformasi Birokrasi harus dilakukan di tubuh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Reformasi Birokrasi harus disertai dengan aksi yang nyata sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta ke depan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sentralisasi dan desentralisasi bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Itulah sebabnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara optimal, demokratis, bertanggungjawab, transparan dan responsive sesuai amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan terutama tantangan dan hambatan di masa pandemi, maupun perkembangan yang semakin sulit dan kompleks saat ini, kelembagaan baru Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang telah dibebankan disajikan beberapa hal berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.
4. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran baik Sasaran Strategis, Sasaran Khusus maupun Sasaran Operasional dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, walaupun ada 2 (dua) KSD (Kegiatan Strategis Daerah) yang realisasinya tidak mencapai 100% yaitu KSD No 20 (KSD Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu) yang terealisasi sebesar 99, 50% dan KSD No 58 (Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik) yang terealisasi sebesar 95%.
5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan yang juga merupakan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dapat terealisasi dengan sangat baik, dimana jumlah pertumbuhan kewirausahaan yang terdaftar dalam sistem Jakprenur berjumlah 70.665 wirausaha dengan rincian 46.903 UKM dan 23.762 UKM
6. Penyerapan APBDP 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM mencapai 96,88% dan secara kualitas pelaksanaan anggaran yang dihitung dari 3

(tiga) komponen yaitu penyerapan anggaran, efisiensi dan output, terealisasi sebesar 91,56% dari target 91%.

7. Hambatan yang dialami Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM adalah adanya refocusing anggaran dan pemberlakuan PPKM yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak maksimal dalam pelaksanaannya seperti Indikator Kinerja Program Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang dan Indikator Kinerja Program Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya.

Demikian Ikhtisar eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari hasil LKIP selengkapnya.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta



Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP. 197009241998032004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. GAMBARAN UMUM**

Pada akhir Tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan mengalami restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dimana Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan bergabung dengan Bidang Industri yang merupakan pecahan dari Dinas Perindustrian dan Energi. Penggabungan Dinas KUKMP dengan Bidang Industri ini diikuti dengan 2 (dua) unit lainnya yaitu Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu mengacu pada prinsip-prinsip good governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan Legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan hasil pembangunannya dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Dalam pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu pemerintahan telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Perpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik Kementerian Negara/Lembaga maupun SKPD untuk menyelenggarakan SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP dimaksud meliputi :

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja;
- f. rewiu dan evaluasi Kinerja.

Jadi, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), setiap penyelenggara pemerintah harus melaksanakan pelaporan kinerja, dimana dalam penyusunan Laporan Kinerja tersebut setiap instansi pemerintah dapat menjelaskan secara ringkas dan lengkap capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Petunjuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara berjenjang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**

### **Kedudukan:**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda. Kedudukan tersebut menunjukkan adanya aspek strategis dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bagian integral dari Organisasi Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan mendukung Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu menjadikan Pemerintah Daerah yang akuntabel

### **Tugas:**

Berdasarkan Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PPKUKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **Fungsi:**

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan penataan, pembinaan, pemberdaya-an dan pengembangan, perdagangan dan kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;

- h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
- i. pelaksanaan penjaminan keteersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- l. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
- m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
- n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- o. pelaksanaan perlindungan konsumen;
- p. pelaksanaan pengujian mutu barang;
- q. pelaksanaan pelatihan perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. pelaksanaan kemetrollogian berupa tera, tern ulang dan pengawasan;
- s. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
- t. pengawasan dan pengendalian perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- u. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- w. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- x. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
- y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- bb. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum
  - 2. Subbagian Kepegawaian
  - 3. Subbagian Program dan Pelaporan
  - 4. Subbagian Keuangan
  
- c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pengembangan Industri
  - 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah
  - 3. Seksi Industri Kreatif dan Digital.
  
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
  - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri
  - 3. Seksi Pemasaran.
  
- e. Bidang Koperasi, terdiri dan :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
  - 2. Seksi Kelembagaan Koperasi
  - 3. Seksi Pembiayaan Koperasi
  
- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah
  - 3. Seksi Usaha Informal
  
- g. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengawasan Perindustrian dan Kemetrolcgian
  - 2. Seksi Pengawasan Perdagangan
  - 3. Seksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  
- h. Suku Dinas Kota dan Suku Dinas Kabupaten
  
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
  
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP 2021**

Esensi dari sistem LKIP bagi Dinas adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian pada instansi pemerintah. Sistem pengendalian ini merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas dapat dipenuhi melalui

implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis dinas dan kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kerja Dinas. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua tujuan utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur dan pihak – pihak terkait atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas atas capaian kinerja yang berhasil atau belum berhasil diperoleh selama Tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran telah dicapai selama Tahun 2021.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gap) yang ditemukan, manajemen Dinas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

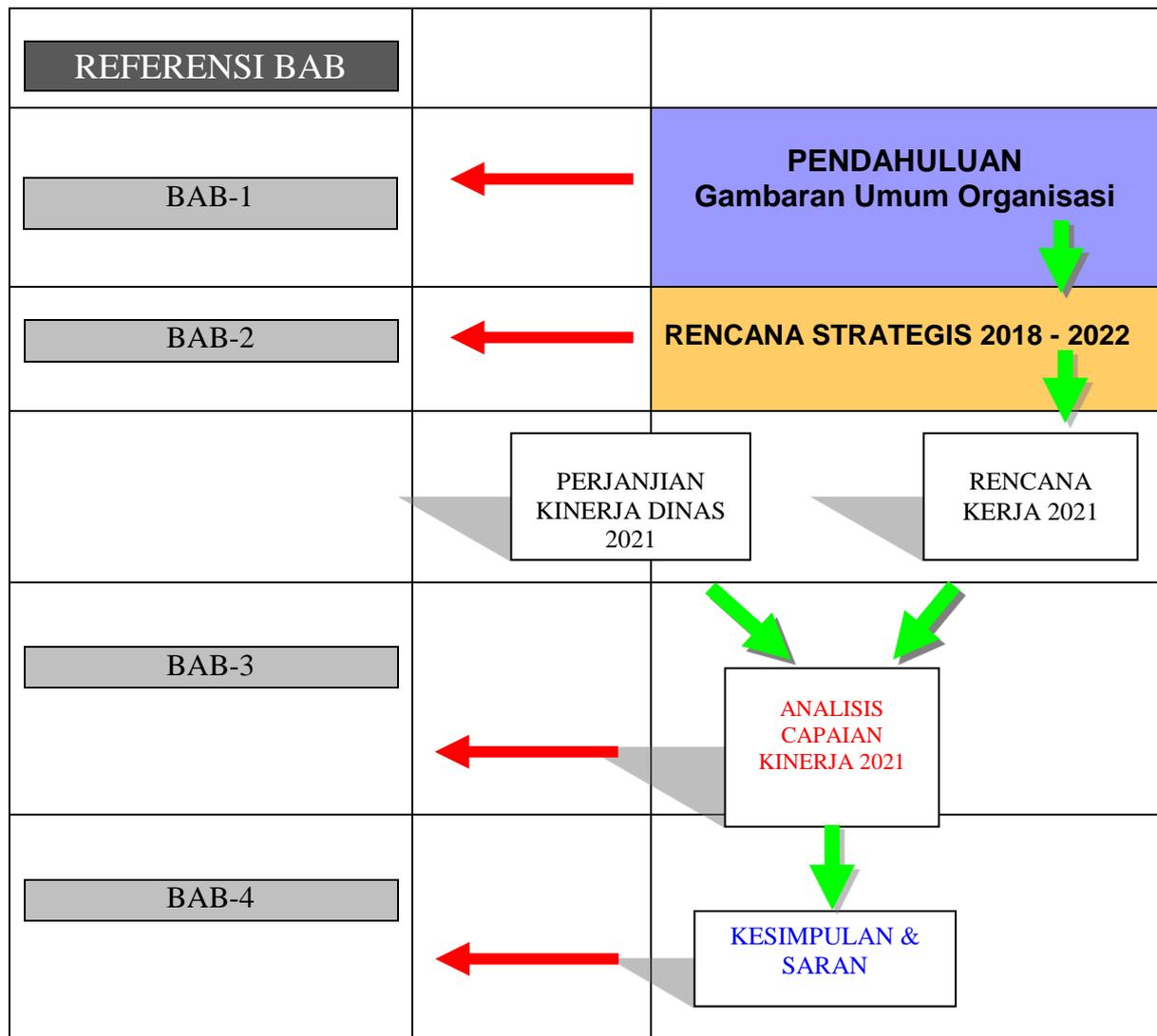
## **1.5. SISTEMATIKA LKIP 2021**

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2021, capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (performance plan) merupakan ukuran keberhasilan tahunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa tahun-tahun

mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat diilustrasikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Sistematika LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam bagan berikut:



# **BAB II**

## **RENCANA STRATEGIS**

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan strategis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 selaras dengan visi misi Gubernur melalui implementasi sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

#### **2.1. VISI dan MISI**

##### **A. Visi**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra, visi yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selaras dengan visi Gubernur yaitu : "Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

**Jakarta:** meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu

kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

**Maju:** memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

**Lestari:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

**Berbudaya:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

**Keberadaban:** keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

**Keadilan:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

**Kesejahteraan:** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Dalam upaya visinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah memperhatikan keselarasannya dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu juga memperhatikan kondisi lingkungan kerja Dinas yang berada di Ibukota negara dengan permasalahan nasional yang lebih kompleks.

Pernyataan visi yang dikemukakan di atas merupakan idealisme yang harus menjadi komitmen segenap pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkannya. Dengan pernyataan visi ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui keberadaan, peran, dan program instansi ini secara tepat.

## **B. Misi**

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misinya selaras misi Gubernur no 2 (dua) dan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

“Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## **2.2. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**

### **A. Tujuan**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan sebagai berikut:

“Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta”

### **B. Sasaran**

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta.
2. Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing
3. Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

### **C. Strategi**

Adapun strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai sasaran di atas, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan pangsa pasar regional dan internasional.
2. Peningkatan penerapan standarisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat).
3. Peningkatan pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta.
4. Peningkatan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten serta kredibilitas kelembagaan yang profesional.
5. Penyediaan sentra dan ruang untuk konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipolgi usaha di wilayah dalam bentuk trading house, Pusat Inovasi, Galery Produk UKM, Pusat Kreatif.
6. Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan.
7. Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional.
8. Peningkatan diversifikasi produk ekspor
9. Pengintensifan kuantitas dan kualitas pengawasan perdagangan.

10. Peningkatan pelayanan tera/tera ulang.
11. Penguatan kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen.

Sasaran dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tiap-tiap sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi visi, misi dan sasaran organisasi

Penyusunan program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Program Urusan Koperasi dan UKM serta Program Urusan Perdagangan di Tahun 2018 memiliki sedikit perbedaan dengan Tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan belum tersusunnya RPJMD 2018-2022 pada saat penyusunan Program Tahun 2018, sehingga penyusunan Program Tahun 2018 mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Kebijakan inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada Tahun 2018 dengan Tahun 2019-2022, setelah RPJMD 2018-2022 tersusun.

Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan untuk Program dan indikatornya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Perubahan nama Program tersebut baru diterapkan di dalam Perencanaan Tahun 2021 seiring dengan adanya perubahan RPJMD yang diikuti dengan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM

Adapun Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM sejak Tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan Tahun 2018:**

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah Volume Usaha Koperasi
2. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM.
  - Indikator Program:
    - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - Indikator Program:
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - Indikator Program:
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)
    - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
    - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
    - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

**Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan Tahun 2019:**

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM.
  - Indikator Program:
    - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi
    - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
    - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
    - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

**Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020:**

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM.
  - Indikator Program:
    - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - Indikator Program
    - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
  - Indikator Program:

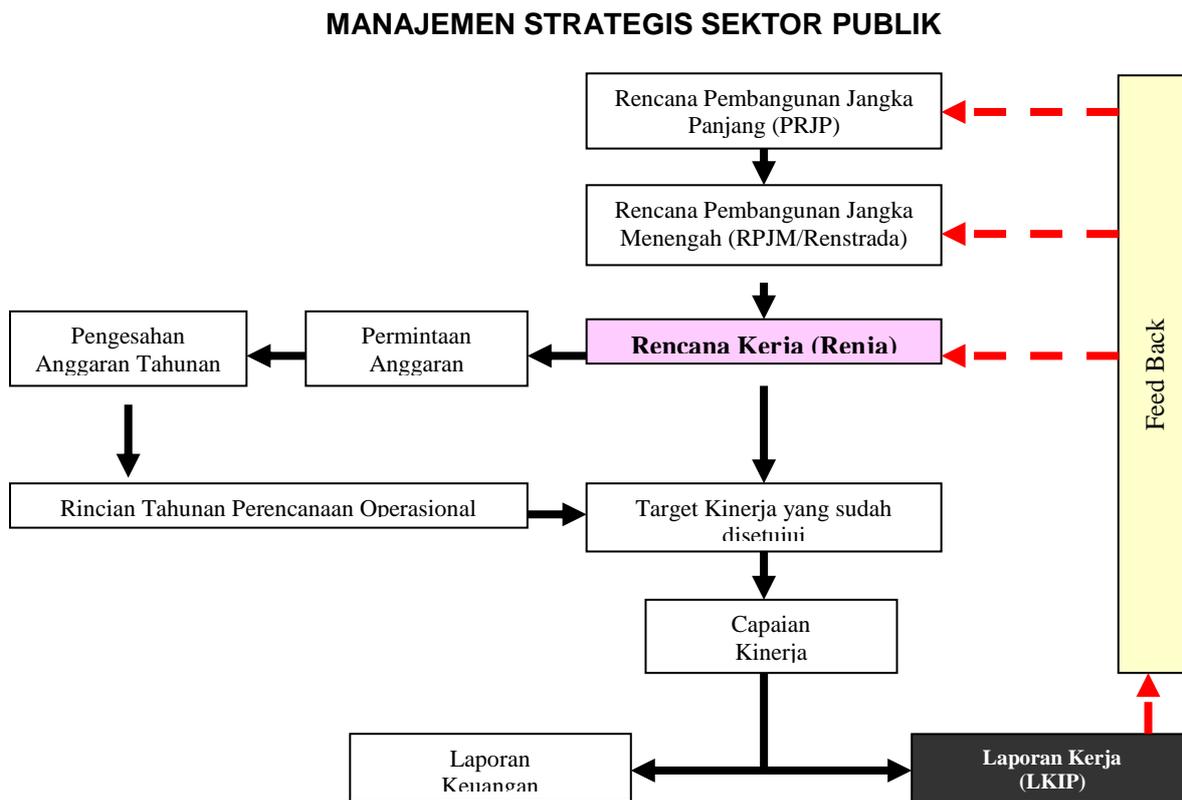
- a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi
  - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
  - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
  - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
    - Indikator Program
      - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
  7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
    - Indikator Program
      - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
  8. Program pembinaan dan Pengembangan Industri
    - Indikator Program
      - a. Jumlah wirausaha industri baru
      - b. Persentase jumlah IKM yang berkualitas
      - c. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
  9. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
    - Indikator Program
      - a. Persentase produk industri dengan standar SNI
      - b. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
  10. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
    - Indikator Program
      - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
  11. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian
    - Indikator Program
      - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

**Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021 :**

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah wirausaha industri baru
    - b. Persentase jumlah IKM yang berkualitas
    - c. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
    - d. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
  - Indikator Program:

- a. Persentase produk industri dengan standar SNI
3. Program Pengembangan Ekspor
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi
    - b. Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi (kode B)
    - c. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
    - d. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Dalam Negeri
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
8. Program Pengembangan UMKM
  - Indikator Program:
    - a. Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
  - Indikator Program:
    - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Indikator Program:
    - b. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Gambar 2.1: Diagram Alur Manajemen Strategis Sektor Publik



### 2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) pada setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2021 ini juga merupakan komitmen dari segenap karyawan dan pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Uraian mengenai Rencana Kinerja 2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN RINCIAN SUB KEGIATAN  
DINAS PPKUKM TAHUN 2021**

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - Sekretariat	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pengelolaan Sistem Informasi Dinas PPKUKM	324.800.000	324.800.000
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	142.220.735.234	121.974.572.831
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.118.000	8.910.800
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah	57.656.841	-
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	902.369.919	902.369.919
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	156.328.018	156.328.018
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.077.770	43.459.460
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	230.555.450	136.638.120
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM Peralatan Kerja	8.135.320	1.660.320
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.226.600	36.226.600
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Genset	597.242.230	-
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	2.579.689.330	2.020.468.300

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin fotokopi	112.384.800	112.384.800
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	166.190.882	166.190.882
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	2.056.915.770	2.053.353.540
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	58.769.022	58.667.244
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus	27.721.300	28.291.300
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	257.933.751	268.180.746
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	128.799.583	116.897.110
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.939.377.726	1.936.019.052
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Gedung Pusat Perbengkelan Kayu Rawa Terate	63.428.000	-
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	73.833.375	73.833.375
Dinas - Industri	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi Mutu Produk	Pelaksanaan Kurasi Produk IKM	108.000.000	27.000.000

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pembahasan Isu-isu Strategis Sektor Perindustrian	70.000.000	70.000.000
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	67.200.000	-
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Jasa Sektor Perindustrian	387.875.546	352.003.464
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal	2.985.991.600	2.984.795.967
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan	2.126.932.490	-
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Industri Kreatif Fashion & Kerajinan	798.811.474	-
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Pendaftaran HKI	622.140.000	-
Dinas - Industri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Gelar Produk IKM (Penyelenggaraan Bazaar IKM dan Pekan Produk IKM)	712.499.070	-
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kompetisi dan Festival Start Up Produk Kreatif sektor Animasi dan Games	1.515.219.184	-
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Industri kreatif Animasi & Games	1.063.788.000	-
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Workshop E Smart	259.193.000	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Proposal Program dan Kegiatan Dekranasda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Hibah Uang untuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta)	1.950.386.500	1.234.133.832
Dinas - Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Penyediaan Sarana dan Prasarana J3C (Jakarta Creative Content Center)	4.318.452.914	-
Dinas - Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Akta Pendirian Koperasi	149.760.000	149.760.000
Dinas - Koperasi	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Partisipasi Harkopnas Expo	226.927.899	-
Dinas - Pengawasan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Proposal Usulan Program Kegiatan BPSK Provinsi DKI Jakarta melalui Dana Hibah APBD Tahun 2021 (Hibah Uang untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta)	1.195.805.000	1.076.361.921
Dinas - Pengawasan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi Mutu Produk	Pengawasan Produk SNI Wajib	66.396.660	48.130.400
Dinas - Pengawasan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengadaan Alat Test Uji Cepat	284.298.850	284.298.850

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - Pengawasan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan Kemetrologian Alat UTTT (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	106.415.950	99.014.500
Dinas - Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Partisipasi Pameran Dalam Kota	1.555.789.500	-
Dinas - Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Partisipasi pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)	522.416.500	-
Dinas - UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Jakarta Creative Hub	2.167.939.809	1.818.788.655
Dinas - UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyusunan Masterplan PKL	1.798.040.140	1.797.821.090
Dinas - UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyusunan Standardisasi Sarana Prasarana Usaha Mikro dan Kecil Pada Kawasan Penataan di Provinsi DKI Jakarta	451.854.260	450.514.460

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2014 untuk Kegiatan kegiatan pembebasan lahan untuk PKL di Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat	-	44.495.000
Dinas - UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2014 untuk Kegiatan perencanaan pembebasan lahan untuk PKL di simprung	-	44.495.000
Dinas - UKM	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM	520.175.150	480.240.860
Dinas - UKM	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan UKM Expo	2.236.227.030	-
Dinas - UKM	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Pemasaran Produk UKM Pada Acara Lebaran Betawi	120.953.129	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Dinas - UKM	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Sunday Market	719.636.280	719.409.328
Sudin - JB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat	2.471.496.000	-
Sudin - JB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat	2.858.575.326	2.608.831.326
Sudin - JB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2019 untuk kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	27.997.216	27.997.216
Sudin - JB	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Barat	546.930.560	546.930.560

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Barat	2.430.287.264	2.430.287.264
Sudin - JB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Barat	2.536.144.953	2.822.001
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.860.800	1.653.600
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.510.015	33.510.015
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.521.649	37.521.649
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.982.665	20.982.665
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	3.043.920	3.043.920
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.508.492	5.508.492
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	395.276.877	307.941.761
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37.461.600	37.461.600
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2019 untuk kegiatan Penyediaan Sewa mesin Fotocopy	2.772.500	2.772.500

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	2.350.760.880	2.350.760.880
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	18.226.604	18.226.604
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	4.132.500	4.132.500
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	3.421.770	3.421.770
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	2.350.760.880	2.350.760.880
Sudin - JB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	19.516.310	19.516.310
Sudin - JB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	-	36.176.013
Sudin - JP	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat	2.380.000.000	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JP	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Pusat	1.125.547.610	1.125.547.610
Sudin - JP	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat	2.890.176.830	2.683.485.960
Sudin - JP	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Pusat	699.336.811	382.440.833
Sudin - JP	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2019 untuk kegiatan Rehabilitasi Lokasi Binaan Abdul Gani	1.954.593.800	1.954.643.915

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JP	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Pusat	573.213.520	573.213.520
Sudin - JP	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Pusat	983.905.474	2.822.001
Sudin - JP	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Pusat	2.423.443.680	2.423.443.680
Sudin - JP	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	-	36.176.013
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	852.600	852.600
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.444.564	45.444.564
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.327.352	19.327.352
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.229.090	18.229.090
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	49.809.600	49.463.700
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.860.780	7.860.780
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	116.072.001	94.630.001

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	28.575.360
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	2.056.915.770	2.056.915.770
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan perlengkapan Petugas keamanan kantor	30.511.250	30.511.250
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	66.054.686	66.054.686
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	9.815.960	9.815.960
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.880.608.704	1.880.608.704
Sudin - JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor	28.950.592	28.950.592
Sudin - JS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan	2.916.470.000	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Selatan	2.097.193.998	16.650.000
Sudin - JS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan	3.682.272.150	3.407.391.830
Sudin - JS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Selatan	1.069.548.224	1.019.694.684
Sudin - JS	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Selatan	691.284.000	691.284.000
Sudin - JS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Selatan	2.426.796.870	-
Sudin - JS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Selatan	3.029.304.600	3.029.304.600

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.447.200	1.296.980
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.206.453	23.206.453
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.613.125	-
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	22.137.600	11.068.800
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.204.000	6.204.000
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	162.983.654	74.392.109
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Foto copy	37.461.600	37.461.600
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	1.234.149.462	1.234.149.462
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	58.289.653	-
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	8.394.400	8.394.400

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	684.354	-
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.469.225.550	1.469.225.550
Sudin - JS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	55.967.340	55.967.340
Sudin - JS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	-	36.176.013
Sudin - JT	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur	3.637.406.362	3.450.098.362
Sudin - JT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Timur	806.446.055	806.446.055

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur	2.780.273.091	2.647.265.441
Sudin - JT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Perencanaan Pembangunan Area UMKM di Kawasan Terpadu Cakung Barat	19.519.456	-
Sudin - JT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur	2.570.647.582	-
Sudin - JT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rehabilitasi Lokasi Binaan di Wilayah Jakarta Timur	174.169.919	174.169.919

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JT	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Timur	1.082.380.200	1.082.380.200
Sudin - JT	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Timur	3.029.304.600	3.029.304.600
Sudin - JT	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Timur	2.246.138.868	-
Sudin - JT	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	-	36.176.013
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.998.780	2.890.000
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.819.145	25.819.145
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.202.880	4.202.880
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	7.990.290	7.263.900
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.923.600	15.923.600
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	49.179.521	49.179.521
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi	37.461.600	34.339.800

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	2.527.067.946	2.527.067.946
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	7.921.100	19.567.100
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	15.173.235	15.173.235
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	790.427	790.427
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	2.938.451.100	2.938.451.100
Sudin - JT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	6.816.568	6.816.568
Sudin - JU	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	2.093.725.500	-
Sudin - JU	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Utara	1.027.599.320	1.027.599.320

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
			Pengentasan Kemiskinan			
Sudin - JU	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	2.273.978.154	2.240.241.718
Sudin - JU	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Utara	1.029.137.446	812.766.299
Sudin - JU	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Utara	102.013.560	102.013.560
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.706.000	930.000
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.512.000	3.196.000
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Peralatan Kerja	55.401.650	15.461.730
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.624.865	12.624.865

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.967.649	27.967.649
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.711.285	-
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.726.327	3.726.327
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.175.380.440	1.173.344.880
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	41.741.788	41.741.788
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	18.384.190	18.384.190
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	4.168.800	4.168.800
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	156.264.621	130.926.120
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	1.410.456.528	1.408.013.856
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	11.515.944	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - JU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin fotocopy	37.461.600	37.461.600
Sudin - JU	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	SOSIALISASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG CUKAI	-	36.176.013
Sudin - JU	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Utara	1.817.582.760	1.814.407.320
Sudin - JU	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Utara	1.714.385.310	-
Sudin - KS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	606.349.464	606.349.464
Sudin - KS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	943.081.590	67.009.800
Sudin - KS	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Kepulauan Seribu	60.861.253	60.861.253

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
			Pengentasan Kemiskinan			
Sudin - KS	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	292.727.625	292.727.625
Sudin - KS	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Partisipasi Pameran Produk Unggulan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	157.375.375	157.375.375
Sudin - KS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pilot Plant Instalasi Pembuatan garam di Wilayah Kepulauan Seribu	764.219.824	-
Sudin - KS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Kepulauan Seribu	606.349.464	606.349.464
Sudin - KS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Kepulauan Seribu	379.351.290	17.126.450
Sudin - KS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Desain Kemasan di Wilayah Kepulauan Seribu	33.758.500	33.758.500
Sudin - KS	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal di Wilayah Kepulauan Seribu	102.737.700	102.737.700
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Akomodasi dan Transportasi di Kepulauan Seribu	646.362.300	146.579.790
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.957.928	2.050.000

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.724.657	7.296.454
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	21.078.893	21.078.893
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.003.232	2.003.232
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	11.530.000	11.530.000
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.442.656	6.442.656
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	51.390.081	37.599.579
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37.461.600	34.056.000
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Pemeliharaan Rutin KDO	14.896.090	-
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO	1.072.500	-
Sudin - KS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	2.053.040	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Audit Internal	17.731.830	9.000.000
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pembangunan Sistem Informasi Laboratorium	94.024.383	94.024.383
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen	6.600.000	6.000.000
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Surveil Laboratorium Uji	46.947.000	36.507.000
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengembangan Kemampuan Uji Personil Lab	44.000.000	33.000.000
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Penyediaan Jasa Petugas Laboran	1.175.380.440	1.175.380.440
UIB2T	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Pelaksanaan Uji banding antar Laboratorium	39.161.000	6.800.000
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.538.000	2.025.180
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.289.741	38.289.741
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.477.658	134.020.458
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.726.670	34.726.670
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan Bakar KDO/KDO Khusus, genset dan peralatan lainnya	14.404.000	14.404.000

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan dan Alat Bantu Laboratorium	488.301.428	434.579.100
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman	25.611.520	17.629.040
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Uji Laboratorium	526.762.356	526.762.356
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	381.537.000	312.934.520
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	34.056.000	23.812.800
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	352.614.132	352.614.132
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor	1.013.100	-
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	4.388.300	4.388.300
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	43.962.413	37.741.385
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	120.065.231	105.018.617
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Laboratorium dan Perkakas Kerja Laboratorium	579.480.633	549.945.633

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalibrasi Alat Laboratorium	167.534.620	167.534.620
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	293.845.110	293.845.110
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	17.990.280	62.346.570
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Laboratorium	199.280.972	199.280.972
UIB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal dan Elektrikal Kantor	58.769.022	58.769.022
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Penyediaan Jasa Laboran	1.182.708.360	1.182.708.360
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengujian	68.250.000	54.600.000
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Uji	18.000.000	18.000.000
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengembangan Kemampuan Uji Personil Laboratorium	36.291.500	-
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji	54.916.840	54.916.840
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Audit Internal / Pelaksanaan Audit Internal Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian	18.000.000	18.000.000

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
UIKT	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Pelaksanaan reakreditasi laboratorium	111.200.000	38.300.000
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.066.360	2.410.000
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	73.420.546	73.420.546
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.572.589	208.180.429
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.920.837	28.920.837
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO	15.653.450	15.653.450
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengisian Gas Instrumentasi Laboratoirium	73.785.822	73.785.822
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan Kimia dan Alat Bantu Laboratorium	667.998.758	334.895.855
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan Penunjang Pengujian	160.398.865	160.398.865
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium	24.121.790	24.121.790
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Suplemen Gizi SDM Laboratorium	139.449.816	20.680.000
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.150.000	7.150.000
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Uji Laboratorium	1.255.727.000	1.255.727.000

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Jaringan Teknologi informasi	21.671.210	21.671.210
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	808.341.600	621.360.120
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin fotocopy	37.461.600	25.977.600
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa petugas keamanan kantor	1.241.843.778	1.241.843.778
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	14.681.051	14.681.051
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa petugas penerima tamu/front officer	118.270.836	118.270.836
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO	7.170.600	7.170.600
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang KDO	62.931.924	34.367.047
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalibrasi alat uji laboratorium	187.281.730	187.281.730
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan alat uji laboratorium	442.445.800	442.445.800
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.923.004	50.923.004

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan jasa petugas kebersihan kantor	1.005.302.106	1.005.302.106
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung kantor	239.424.920	239.424.920
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan bahan dan alat kebersihan	38.194.420	38.194.420
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penanganan Limbah laboratorium	78.174.250	78.174.250
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan tanggul banjir dan kelengkapannya	86.334.000	-
UIKT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal	118.270.836	118.270.836
Metrologi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pelayanan Kemetrologian	129.797.602	129.797.602
Metrologi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kemetrologian (PHL)	1.763.070.660	1.763.070.660
Metrologi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kemetrologian	32.800.000	10.000.000
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.837.000	2.111.800
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	99.705.485	99.705.485

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.745.593	295.745.593
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	248.409.832	248.409.832
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	105.554.760	105.554.760
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.048.000	18.048.000
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	37.461.600
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	15.476.000	14.780.000
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	180.073.683	180.073.683
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	239.363.630	239.363.630
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kemetrolagian	2.896.542.593	2.896.542.593
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Standarisasi Kemetrolagian	167.037.970	167.037.970
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Pengelolaan Air Limbah	128.854.880	128.854.880

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan Rehab Gedung Instalasi	476.764.530	-
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	961.234.807	961.234.807
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan	10.321.630	10.321.630
Metrologi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar dan Pembentukan Daerah Tertib Ukur	3.325.000	-
Metrologi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Penyediaan Alat Penunjang Kemetrologian	354.096.688	354.096.688
UPK PPKUKMP Pulo Gadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.844.000	234.489.840
UPK PPKUKMP Pulo Gadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa keamanan kantor	2.820.913.056	2.820.913.056
UPK PPKUKMP Pulo Gadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	352.614.132	352.614.132
UPK PPKUKMP Pulo Gadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Penyediaan Jasa Upah Pegawai Non ASN BLUD UPK PPUKMP Pulogadung	2.802.958.608	2.730.959.028
UPK PPKUKMP Pulo Gadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Penyediaan Operasional BLUD	4.127.025.312	2.386.683.616
Pusdiklat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP dan USP (DAK)	354.084.788	354.084.788

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Pusdiklat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP (DAK)	363.209.588	461.475.997
Pusdiklat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Manajemen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Berbasis IT (DAK)	411.353.648	411.353.648
Pusdiklat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (DAK)	354.084.788	354.084.788
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan Perpajakan (DAK)	434.060.928	434.060.928
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Koperasi dan UKM (DAK)	368.500.000	368.500.000

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan Prosedur Ekspor (DAK)	401.221.483	401.221.483
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Kewirausahaan	38.450.000	-
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimtek Pemahaman Bahan Makanan dalam Kemasan Tertutup (BDKT)	28.655.000	-
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun Bagi UKM	28.655.000	-
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimtek Good Hygienic Practices dan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Berbasis Hazard Analysis Critical Point	28.655.000	-
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan	137.087.000	137.087.000
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimtek Strategi Perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	28.655.000	-
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Diklat Negosiasi Bisnis dan Manajemen Biaya Bagi UKM	38.450.000	-

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimtek Display Penataan Produk	28.655.000	-
Pusdiklat	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Diklat Manajemen Retail Bagi UKM	38.450.000	-
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.068.000	1.581.080
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.156.536	78.156.536
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.470.272	176.470.272
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.875.588	-
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.710.900	30.710.900
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	15.054.420	11.738.084
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.408.000	12.408.000
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	171.755.030	93.729.950
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	117.480.000	93.005.000
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	411.383.154	411.383.154

SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	APBD 2021	APBDP 2021
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	56.309.825	56.309.825
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	10.551.739	10.551.739
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	1.640.200	1.640.200
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	22.795.949	22.795.949
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	176.307.066	176.307.066
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	337.618.226	-

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga menyusun Perjanjian Kinerja dari tingkat Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II sampai dengan Pejabat Eselon IV.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI YANSYAH  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

ANDRI YANSYAH  
NIP 197009271991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Andri Yansyah  
 NIP : 197009271991011001  
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
1	Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta	1	Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	e-SAKIP	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru dan/atau wirausaha naik kelas binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM.	N/A	N/A	N/A	33,359	33,359	Wirausaha
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	e-SAKIP	Nilai transaksi domestik untuk keseluruhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan tujuan akhir untuk konsumen	N/A	N/A	N/A	212.009.400.000.000	212.009.400.000.000	Rupiah
3	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	1	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	e-SAKIP	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat di dalam sistem Jakpreneur	12.220.050.000	24.440.100.000	85.540.350.000	122.200.500.000	244.401.000.000	Rupiah
4	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	e-SAKIP	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi industri pengolahan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	134.471.200.000.000	134.471.200.000.000	Rupiah
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq</math> 80%. Apabila serapan anggaran di bawah &lt; 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:                      1. Serapan Anggaran <math>\geq</math> 80% dan output 100%                      Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persentase

6	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kelangkaan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kelangkaan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) nomor (17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) Nomor(17)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
8	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	N/A	100%	100%	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
13	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Pencemaran Udara Nomor(71)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

SASARAN KHUSUS											
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe II	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemerikasaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3 (WTP)	N/A	N/A	3 (WTP)	WTP
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat

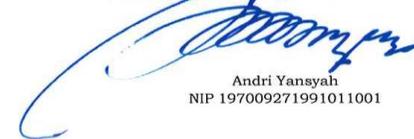
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>											
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021  
Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta,



Andri Yansyah  
NIP 197009271991011001

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. TARGET CAPAIAN AKUNTABILITAS ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM memiliki Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional, yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sebagai berikut

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
<b>SASARAN STRATEGIS</b>				
1	Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta	Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	33.359	wirausaha
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	212.009.400.000.000	rupiah
3	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	244.401.000.000	rupiah
4	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	134.471.200.000.000	rupiah
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persentase
6	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	100%	Persentase
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) nomor (17)	100%	Persentase
8	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembinaan dan Pengembangan	100%	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)		
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	Persentase
11	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	Persentase
13	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	100%	Persentase
<b>SASARAN KHUSUS</b>				
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II	1	Paket
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	WTP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	Predikat
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB	92	Nilai
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>				
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persentase
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

**2. REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Sesuai dengan target Perjanjian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja DPPKUKM Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>SASARAN STRATEGIS</b>					
1	Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	wirausaha	33.359	70.665	211,83%
2	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	rupiah	212.009.400.000.000	363.850.000.000.000	171,62%
3	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	rupiah	244.401.000.000	1.626.555.796.924	665,53%
4	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	rupiah	134.471.200.000.000	264.400.000.000.000	196,62%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91%	91,56%	100,62%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	Persentase	100%	100%	100,00%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) nomor (17)	Persentase	100%	100%	100,00%
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	Persentase	100%	99,65%	99,65%
9	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	Persentase	100%	100%	100,00%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Persentase	100%	100%	100,00%
10	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	Persentase	100%	100%	100,00%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	Persentase	100%	95%	95,00%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	Persentase	100%	100%	100,00%
11	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	Persentase	100%	100%	100,00%
12	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	Persentase	100%	100%	100,00%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
13	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	Persentase	100%	100%	100,00%
<b>SASARAN KHUSUS</b>					
14	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II	Paket	1	2	200,00%
15	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100%	100%	100,00%
16	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3 (WTP)	3 (WTP)	100,00%
17	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100%	100%	100,00%
18	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	A (81)	AA (94,20)	116,30%
19	Nilai PMPRB	Nilai	92	99,29	107,92%
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>					
20	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100,00%
21	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100%	100%	100,00%
22	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	100%	100,00%

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis, terdiri dari:

a. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan

Definisi operasional dari indikator jumlah pertumbuhan kewirausahaan adalah jumlah pertumbuhan wirausaha baru dan/atau wirausaha naik kelas binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, definisi Wirausaha Baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, data realisasi jumlah pertumbuhan kewirausahaan yaitu berdasarkan data Pendaftaran, karena setiap peserta Jakprenur yang telah terdaftar di dalam sistem akan didampingi atau diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu untuk peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Setiap peserta yang

terdaftar dapat mengikuti tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tanpa harus berurutan.

Pada tahun 2021, jumlah pertumbuhan kewirausahaan mencapai target yaitu sebanyak 70.665 wirausaha dari target 33.359, yang terdiri dari 23.762 IKM dan 46.903 UKM. Realisasi atas indikator tersebut di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur		Total per Wilayah
		IKM	UKM	
1	Jakarta Pusat	2176	11.908	14.084
2	Jakarta Utara	3167	6.654	9.821
3	Jakarta Barat	6852	6.417	13.269
4	Jakarta Selatan	5.808	10.882	16.690
5	Jakarta Timur	5.734	10.945	16.679
6	Kepulauan Serib	25	97	122
<b>JUMLAH</b>		<b>23.762</b>	<b>46.903</b>	<b>70.665</b>

Program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki 4 Indikator Kinerja Program, dimana salah satunya indikatornya adalah jumlah wirausaha industri baru dengan target di tahun 2021 sebesar 5.560 dan terealisasi sebesar 23.762 wirausaha. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

- a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Rincian Sub Kejadiannya:
  - Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  - Pendampingan Kewirausahaan IKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- b) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan Rincian Sub Kejadiannya:
  - Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur

- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki Indikator Kinerja Program pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
- a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pembinaan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
    - Pendampingan Kewirausahaan UKM di 4 (empat) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan Pembinaan Kewirausahaan UKM di lima wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan – pelatihan soft skill dan hard skill yang diberikaan kepada masyarakat untuk menciptakan wirausaha baru.

Pendampingan Kewirausahaan IKM dan Pendampingan Kewirausahaan UKM di lima wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat oleh tenaga pendamping tingkat Kecamatan untuk dapat menjadi wirausaha baru dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendaftaran  
Tahap Awal yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) agar peserta terdaftar dan terdata dalam sistem PKT DKI Jakarta
- b) Pelatihan  
Peserta diberikan Materi Pelatihan tentang Kewirausahaan oleh Narasumber dari PGO dan IPB yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- c) Pendampingan  
Dalam tahap ini para peserta PKT di berikan pendampingan di Kantor Kecamatan setiap hari Sabtu Pukul 08.00 – 11.00 WIB, selain itu Pendampingan dapat dilakukan juga dalam bentuk jemput bola ke tempat usaha UKM di Wilayah Binaan
- d) Perizinan

Dalam tahap Perizinan para PKT didampingi oleh pendamping dan Perizinan di keluarkan oleh PTSP tingkat Kelurahan tanpa dipungut biaya

e) Pemasaran

Para Anggota PKT diberikan fasilitas untuk memasarkan Produk di Bazar-bazar yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, Kota ataupun Provinsi serta Event-event besar lainnya

f) Pelaporan Keuangan

Dalam tahap ini para peserta / anggota PKT diberikan Pelatihan tentang pengelolaan keuangan suatu usaha agar usaha yang dijalankan dapat terus meningkat dan naik kelas dalam level usahanya

g) Perizinan

Dalam tahapan ini para anggota PKT yang telah menyelesaikan 6 tahapan diberikan surat keterangan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman permodalan di Bank yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. Capaian Indikator Kinerja Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasai mobil dan sepeda motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Periode	Nilai (dalam trilyun rupiah)
1	Tw 1	121,61
2	Tw 2	121,27
3	Tw 3	120,97
4	Tw 4	Belum ada data
<b>TOTAL</b>		<b>363,85</b>

(sumber BPS Provinsi DKI Jakarta)

Nilai Kontribusi sektor perdagangan untuk tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta s.d 31 Desember 2021 baru s.d triwulan 3 dengan nilai sebesar Rp.363.850.000.000.000.

Program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja tersebut, diantaranya:

- 1) Program Pengembangan Ekspor, dengan Indikator Kinerja Program jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program tersebut yaitu:
  - a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Partisipasi Pameran Produk Unggulan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
    - Penyelenggaraan Bazaar UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  - b) Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Penyelenggaraan Bazaar UKM.
    - Penyelenggaraan Sunday Market.
- 2) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Kinerja Programnya:
  - Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi.
  - Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti.
  - Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang.Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
  - a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pengawasan Kemetrolagian Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
    - Penyediaan Alat Penunjang Kemetrolagian.
  - b) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pelaksanaan Kurasi Produk IKM.
    - Pengawasan Produk SNI Wajib.
    - Pengadaan Alat Test Uji Cepat.
    - Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji.
    - Penyediaan Jasa Petugas Laboran.
    - Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kemetrolagian (PHL), dsb.

- c) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
  - Proposal Usulan Program Kegiatan BPSK Provinsi DKI Jakarta melalui Dana Hibah APBD Tahun 2021 (Hibah Uang untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta).
- 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator Kinerja Program Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
  - a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Akta Pendirian Koperasi.
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan Indikator Kinerja Program Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
  - a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Mendapat Fasilitas Penerbitan Akta Pendirian, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP dan USP (DAK).
    - Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP (DAK).
    - Pelatihan Manajemen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Berbasis IT (DAK).
    - Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (DAK).
- 5) Program Pengembangan UMKM dengan Indikator Kinerja Program Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
  - a) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, dengan beberapa Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pelatihan Kewirausahaan.
    - Pelaksanaan Bimtek Pemahaman Bahan Makanan dalam Kemasan Tertutup (BDKT).
    - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun Bagi UKM.
    - Pelaksanaan Bimtek Good Hygienic Practices dan Penerapan Sistem

Jaminan Keamanan Pangan Berbasis Hazard Analysis Critical Point.

- Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan.
- Diklat Manajemen Retail Bagi UKM, dsb.

c. Capaian Indikator Kinerja Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta

Definisi dari indikator tersebut adalah Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur. Pada tahun 2021, nilai jumlah omset yang dihasilkan sebesar Rp 1.626.555.796.924 dengan capaian sebesar 665,53% dari target yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja tersebut, adalah:

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan beberapa Rincian Sub Keegiatannya:

- Pengelolaan Jakarta Creative Hub.
- Penyusunan Masterplan PKL.
- Pembinaan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Pendampingan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Pusat, Timur, Utara.
- Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara.
- Pelatihan Prosedur Ekspor (DAK), dsb.

d. Capaian Indikator Kinerja Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Periode	Nilai (dalam trilyun rupiah)
1	Tw 1	87.45
2	Tw 2	86.36
3	Tw 3	90.59
4	Tw 4	Belum ada data
<b>TOTAL</b>		<b>264.40</b>

(sumber BPS Provinsi DKI Jakarta)

Nilai Kontribusi sektor perdagangan untuk tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta s.d 31 Desember 2021 baru s.d triwulan 3 dengan nilai sebesar Rp.264.400.000.000.000.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja tersebut, adalah:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
  - a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
    - Pendampingan Kewirausahaan IKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
    - Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
    - Pendampingan Desain Kemasan di Wilayah Kepulauan Seribu
    - Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal di Wilayah Kepulauan Seribu
  - b) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur
  - c) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan Rincian Sub Keegiatannya:
    - Pembahasan Isu-isu Strategis Sektor Perindustrian
    - Penyediaan Jasa Sektor Perindustrian
    - Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal

- Proposal Program dan Kegiatan Dekranasda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Hibah Uang untuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta)

e. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- 3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi dalam melakukan pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKUKM sesuai dengan kriteria kondisinya dimana serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%) \\ \text{Realisasi} &= (40\%) + ((3,12\% \times 10\%)/20\%) + (50\%) \\ &= \mathbf{91,56\%} \end{aligned}$$

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja tersebut, adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program tersebut yang digunakan oleh Sudin di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program tersebut yang digunakan oleh Dinas dan UPT di lingkungan Dinas PPKUKM.  
Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja baik Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yaitu:

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Rincian Sub Kegiatannya:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Rincian Sub Kegiatannya:
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus, dsb
  - c) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Rincian Sub Kegiatannya:
    - Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus
    - Pemeliharaan Alat Laboratorium dan Perkakas Kerja Laboratorium
    - Kalibrasi Alat Laboratorium
    - Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
    - Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor, dsb.
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f) Peningkatan Pelayanan BLUD
  - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program tersebut adalah program dari Diskominfo. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM adalah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dengan Rincian Sub Kegiatannya adalah Pengelolaan Sistem Informasi Dinas PPKUKM
- f. Capaian Indikator Kinerja yang bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM memiliki 11 Kegiatan Strategis Daerah, dimana semua Rencana Aksi dari Kegiatan Strategis Daerah tersebut terealisasi 100% kecuali:
- 1) KSD 20 yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang terealisasi sebesar 99,65%.
  - 2) KSD 58 yaitu Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik yang terealisasi sebesar 95%.

g. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus.

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Khusus ada 3 (tiga) indikator yang capaiannya di atas 100% yaitu:

- 1) Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II, yang terlaksana 2 paket dari target 1 paket dengan capaiannya sebesar 200%
- 2) Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021, yang mendapat nilai 94,20 (AA) dari target 81 (A) dengan capaiannya sebesar 116,30%
- 3) Nilai PMPRB, yang mendapat nilai 99,29 dari target nilai 92 dengan capaiannya sebesar 107,92%

h. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Operasional.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM selalu menindaklanjuti setiap arahan dari Gubernur, pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam sistem CRM dan juga temuan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini menjadikan semua Indikator Kinerja Sasaran Operasional terelisasi 100%.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Khusus atau pun Operasional, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM telah melakukan kegiatan baik yang dibiayai APBD maupun kegiatan yang berkolaborasi dengan stake holder seperti, Perguruan Tinggi, Market online, Perusahaan Swasta maupun BUMN/BUMD ataupun Lembaga Negara lainnya. Beberapa Kegiatan yang telah dilakukan di Tahun 2021 untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran yang juga merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

- 1) Vaksinasi Pelaku Usaha UKM.
  - Dinas PPKUKM telah berkolaborasi membentuk Sentra Vaksin bersama para kolaborator yaitu dengan APPBI, Kadin, APRINDO, HIPPIINDO, Pasar Pagi Mangga Dua, Enesis Group dan PT Betawi Jaya Mandiri.
  - Realisasi jumlah total vaksinasi untuk UMKM sebanyak 520.079 peserta
- 2) Kolaborasi dengan aplikator dalam hal pelatihan, pemasaran melalui e-Commerce, literasi keuangan dan permodalan.
- 3) Relaksasi Retribusi.

Dinas PPKUKM telah melakukan relaksasi retribusi sejak tahun 2020 dengan dasar hukumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 4) Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh Pemerintah Pusat.

Dinas PPKUKM telah memfasilitasi pendaftaran UMKM untuk dapat menerima BPUM

(Bantuan Produktif Usaha Mikro). Rincian penerima BPUM tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tahun SK Penerima	Perincian Penerima BPUM	Jumlah pelaku usaha mikro	Nilai bantuan (Rp)/orang	Jumlah Dana (Rp)
1	2020	Penerima BPUM Usulan Dinas	222.869	2.400.000	534.885.600.000
		Penerima BPUM Usulan Non Dinas (BUMN, Perbankan, Lembaga Lainnya)	184.954	2.400.000	443.889.600.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>407.823</b>		<b>978.775.200.000</b>
2	2021	Penerima BPUM Usulan Dinas Thn 2020	313.494	1.200.000	376.192.800.000
		Penerima BPUM Usulan Dinas Thn 2021	75.144	1.200.000	90.172.800.000
		Penerima BPUM Non Usulan Dinas Tahun 2020	110.583	1.200.000	132.699.600.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>499.221</b>		<b>599.065.200.000</b>
		<b>Jumlah Total Penerima BPUM 2020 dan 2021</b>	<b>907.044</b>		<b>1.577.840.400.000</b>

5) Pelaksanaan Gebetan UMKM untuk seluruh ASN Dinas PPKUKM.

Program Gebetan UMKM adalah program pembelian produk UKM/IKM Binaan Jakpreneur oleh ASN Dinas PPKUKM yang bekerjasama dengan Koperasi Pegawai.

6) Pelaksanaan Bazaar online UMKM.

Pada masa pandemi ini, Bazar online UMKM merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu meningkatkan omset UMKM yang terkendala dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rincian pelaksanaan Bazar online melalui website yang diakomodir oleh 5 (lima) Sudin PPKUKM wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	BORJU Jakarta Utara	POS JP Jakarta Pusat	JAMUR BETAWI Jakarta Timur	JAKPRENEUR BARAT FESTIVAL Jakarta Barat	BLANJA JAKSEL Jakarta Selatan
Total UMKM Jakpreneur Yang Mengikuti Bazar Online	2020: 1.271 umkm 2021: 1.461 umkm	383 UMKM	739 UMKM	2020 : 297 UMKM 2021 : 220 UMKM	2020: 1200 UMKM 2021: 2544 UMKM
Total Omzet UMKM Yang Mengikuti Bazar Online	2020: Rp105.890.050 2021: Rp187.783.715	Rp. 48.203.000	Rp. 5.980.000	2020 : Rp. 31.105.000 2021 : Rp. 248.883.570	2020: Rp. 6.419.000 2021: Rp. 7.635.000
Total Produk UMKM yang dijual pada Bazar Online	2020: 3885 produk 2021: 7573 produk	676 Produk	900 Produk	2020 : 297 Produk 2021 : 464 Produk	2020: 1253 Produk 2021: 2607 Produk

INDIKATOR	BORJU Jakarta Utara	POS JP Jakarta Pusat	JAMUR BETAWI Jakarta Timur	JAKPRENEUR BARAT FESTIVAL Jakarta Barat	BLANJA JAKSEL Jakarta Selatan
Frekuensi Pelaksanaan Bazar Online	Thn 2020 : 10 kali Thn 2021: 20 Kali	Thn 2020 : - Thn 2021 : bazaar online 2 kali dan katalog online	Tahun 2020 : - Tahun 2021 : 8 Kali	Thn 2020 : 1 kali Thn 2021 : 2 kali	2020 : 4 kali 2021 : 8 kali

7) Pelaksanaan Bazaar APBD UMKM

Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah melakukan bazar di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan jumlah event bazar mencapai 94 event, jumlah peserta sebanyak 5.000 peserta dan jumlah omset mencapai Rp 1.880.839.849, dengan rinciannya sebagai berikut:

WILAYAH	REALISASI		
	JUMLAH EVENT	JUMLAH PESERTA	JUMLAH OMSET
JAKARTA PUSAT	18	742	272.900.000
JAKARTA UTARA	12	1460	187.645.749
JAKARTA BARAT	9	580	419.871.000
JAKARTA SELATAN	22	680	241.882.000
JAKARTA TIMUR	22	716	666.866.100
KEPULAUAN SERIBU	11	822	91.675.000
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>1.880.839.849</b>

8) Pelaksanaan Bazaar Kolaborasi UMKM

Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan BUMD dan Stakeholder swasta. Jumlah event bazar yang dilaksanakan mencapai 44 event dengan jumlah peserta sebanyak 2972 peserta dan jumlah omset mencapai Rp 1.310.303.118, dengan rinciannya sebagai berikut:

WILAYAH	REALISASI		
	JUMLAH EVENT	JUMLAH PESERTA	JUMLAH OMSET
JAKARTA PUSAT	9	446	154.819.280
JAKARTA UTARA	8	667	98.326.880
JAKARTA BARAT	4	418	425.072.570
JAKARTA SELATAN	5	135	140.501.000

WILAYAH	REALISASI		
	JUMLAH EVENT	JUMLAH PESERTA	JUMLAH OMSET
JAKARTA TIMUR	13	1122	340.571.300
KEPULAUAN SERIBU	5	184	151.012.088
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>2972</b>	<b>1.310.303.118</b>

9) Pelaksanaan Jumat Beli Lokal.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM memfasilitasi UMKM untuk melaksanakan pemasaran online lewat program Jumat Beli Lokal melalui platform Tokopedia. Selama tahun 2021, telah dilaksanakan 11 tema Jumat Beli Lokal dengan jumlah UMKM sebanyak 706 peserta dan omset yang dihasilkan sebanyak Rp 425.601.812

10) Pelaksanaan Jakpreneur Goes To Mall.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan 6 (enam) Pusat perbelanjaan untuk melaksanakan *Jakpreneur Goes to Mall*. Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan *Jakpreneur Goes to Mall* sebanyak 151 UMKM, dengan omset mencapai Rp. 1.058.062.209.

11) Pelaksanaan Christmas Market

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan Christmas di Jakarta dengan mengadakan Christmas Market di Kota Tua selama 6 Hari. Kegiatan tersebut diikuti oleh 72 UMKM dengan omset sebesar Rp. 107.226.500

12) Pelaksanaan Jakpreneur Fest

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan Jaktour dan Shopee dalam pelaksanaan Jakpreneur Fest 2021. Jumlah UMKM yg berpartisipasi dalam kegiatan Jakpreneur Fest 2021 sebanyak 710 UMKM, dengan omset mencapai Rp. 1.442.433.075. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

Kegiatan	Realisasi	
	Jumlah Peserta	Jumlah Omset
Jakpreneur Fest Bazar Online	665	1.325.595.075
Pasar Jakpreneur	45	116.838.000
<b>TOTAL</b>	<b>710</b>	<b>1.442.433.075</b>

3. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

1) Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PPKUKM Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
1	Thn 2020 : Peningkatan Pelaku Kewirausahaan Thn 2021 : Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	pelaku usaha wirausaha	33.359	33.359	85.746	70.665
2	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	rupiah	-	212.009.400.000.000	-	363.850.000.000.000
3	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	rupiah	-	244.401.000.000	-	1.626.555.796.924
4	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	rupiah	-	134.471.200.000.000	-	264.400.000.000.000
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	100%	91%	95,02%	91,56%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	Persentase	-	100%	-	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) nomor (17)	Persentase	-	100%	-	100%
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	Persentase	100%	100%	98,67%	99,65%
9	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	Persentase	100%	100%	100%	100%
10	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Persentase	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	Persentase	100%	-	100%	-
12	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	Persentase	100%	100%	100%	100%
13	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	Persentase	-	100%	-	95%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
14	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	Persentase	100%	100%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	Persentase	-	100%	-	100%
16	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun (nomor 56)	Persentase	100%	-	100%	-
17	Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang (nomor 59)	Persentase	100%	-	100%	-
18	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (nomor 43)	Persentase	100%	-	100%	-
19	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	Persentase	100%	100%	100%	100%
20	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (nomor 70)	Persentase	100%	-	100%	-
21	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	Persentase	-	100%	-	100%
<b>SASARAN KHUSUS</b>						
22	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Paket	1	-	0	-
23	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II	Paket	-	1	-	2
24	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	30%	100%	27%	100%
25	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3 (WTP)	3 (WTP)	3 (WTP)	3 (WTP)
26	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100%	100%	100%	100%
27	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	-	A (81)	-	AA (94,20)
28	Nilai PMPRB	Nilai	-	92	-	99,29
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>						
29	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%	100%
30	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
31	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	100%	100%	100%

a. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKUKM Tahun 2018 – 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM di Tahun 2018 – 2020 merupakan Indikator dari Kinerja Program yang terdiri dari 12 IKU. Selanjutnya di Tahun 2021, IKU Dinas PPKUKM mengalami perubahan, dimana IKU tersebut merupakan bagian dari Indikator Sasaran, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKUKM menjadi 2 IKU. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKUKM dibandingkan dengan Target yang terdapat di dalam Renstra adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah wirausaha industri baru	Wira usaha	-	-	5.560	-	-	-	26.297	-
2	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	Persen	-	-	12,66	-	-	-	18,39	-
3	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	Persen	-	-	43,7	-	-	-	48,5	-
4	Persentase produk industri dengan standar SNI	Persen	-	-	76	-	-	-	90,77	-
5	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	Persen	-	-	42,52	-	-	-	28,91	-
6	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	-	120	120	-	-	128	125	-
7	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	10.000	27.799	27.799	-	17.534	29.717	59.449	-
8	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	Pasar	16	-	-	-	16	-	-	-
9	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolgian	Pasar	-	18	20	-	-	18	20	-

No	IKU	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	yang diawasi									
10	persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	-	100	100	100	-
11	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	Persen	96	97	98	-	314,56	190,19	82,15	-
12	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	-	8.103.915.444,69	5.963.633.980,61	8.775.826.509,30	-
13	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Rupiah	-	-	-	244.401.000.000	-	-	-	1.626.555.796.924
14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	-	-	-	91%	-	-	-	91,56%

b. Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas PPKUKM Tahun 2018 - 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	8.103.915.444,69	5.963.633.980,61	8.775.826.509,30	38.966.277.235,81
2	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	Pasar	16	-	-	-	16	-	-	-
3	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolgian yang diawasi	Pasar	-	18	20	22	-	18	20	22
4	persentase keluhan/temuan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	yang ditindaklanjuti									
5	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	%	96	97	98	99	314,56	190,19	82,15	78,38
6	Jumlah pasar yang menggunakan alat kemitrologian yang diawasi	Pasar	-	18	20	22	-	18	20	22
7	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri	Orang	-	-	-	75	-	-	-	626
8	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Rupiah	4.986.712.500.000	-	-	-	14.825.107.746.377	-	-	-
9	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	-	120	120	120	-	128	125	126
10	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	-	-	-	70	-	-	-	502
11	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis	Orang	-	-	-	70	-	-	-	4.800
12	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	10.000	27.799	27.799	27.799	17.534	29.717	59.449	46.903
13	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	2.000	5.560	5.560	5.560	2.009	18.425	26.297	23.762
14	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	%	7,04	9,85	12,66	15,47	7,04	9,85	18,39	22,58

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	%	14,6	29,1	43,7	58,3	14,6	54	48,5	175,97
16	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	%	15,03	28,77	42,52	56,26	15,11	28,77	28,91	33,85
17	Persentase produk industri dengan standar SNI	%	72	74	76	78	88,51	74	90,77	87,37
18	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	4	4	4	4	4
19	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	4	3	3	4	4

Analisis hasil (outcome) dari pencapaian Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan pelayanan dalam penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk mendukung UKM dalam melakukan ekspor. Ekspor di Tahun 2021 berdasarkan SKA telah mencapai USD 38.966.277.235,81.
- 2) Telah dilaksanakan pengawasan terhadap PKL dan pelaku usaha atas produk SNI, barang beredar, produk makanan dan minuman serta pengawasan terhadap alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) baik di pasar tradisional maupun modern sebanyak 22 pasar.
- 3) Adanya tindak lanjut terhadap setiap keluhan konsumen yang masuk baik dari CRM maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebesar 100%.
- 4) Telah dilaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian dan Sidang Tera Pasar sehingga cakupan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang terealisasi sebesar 78,38%. Adanya pembatasan PPKM yang menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan Sidang Tera Pasar sehingga nilai realisasi cakupan UTTP tidak mencapai target
- 5) Telah dilaksanakan kegiatan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi untuk memfasilitasi Koperasi dalam berbadan hukum serta adanya pendampingan terhadap Koperasi dalam pengajuan sertifikat NIK, yang menghasilkan 126 Koperasi bersertifikat NIK di Tahun 2021.
- 6) Telah dilaksanakan pelatihan kepada UMKM dan Koperasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan PPKUM baik melalui anggaran maupun kolaborasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PELATIHAN	PESERTA
<b>A.</b>	<b>Pelatihan Untuk UKM</b>	
1	Bimtek Pemahaman BDKT	750
2	Bimtek Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun bagi UKM	750
3	Bimtek Good Hyginic Practies dan Penerapan Sistem Jaminan keamanan Pangan Berbasis Hazard Analysis Critical Point	750
4	Bimtek Strategi Perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	750
5	Bimtek Display Penataan Produk Berkolaborasi dengan Universitas Bakrie	300
6	Gerakan Diklat Kilat Sehari, Pembuatan NPWP Bagi Para Jakpreneur	880
7	Pelatihan Manajemen Retail Bagi UKM Berkolaborasi dengan Scarf Media	300
8	Pelatihan Prosedur Ekspor (DAK)	160
9	Pelatihan Perpajakan (DAK)	160
	<b>JUMLAH</b>	<b>4800</b>
<b>B.</b>	<b>Pelatihan Untuk Koperasi</b>	
1	Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan	
5	Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (DAK)	120
6	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP (DAK)	120
7	Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP (DAK)	142
8	Pelatihan Manajemen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Berbasis IT (DAK)	120
	<b>JUMLAH</b>	<b>502</b>

- 7) Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kewirausahaan di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan oleh tenaga pendamping yang menghasilkan 70.665 wirausaha baru yang terdiri dari 23.762 IKM dan 46.903 UKM. Pembinaan kewirausahaan UKM dan IKM dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Market Place, Perusahaan Swasata, BUMN/BUMD dengan jumlah peserta sebanyak 64.719 yang dilaksanakan dalam 569 event.
- 8) Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek dengan diikuti oleh 1.193 IKM yang

mendukung Indikator Kinerja persentase jumlah IKM yang berkualitas dengan nilai realisasi sebesar 22,58%

- 9) Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Industri Kreatif kepada 525 IKM melalui pelatihan makanan dan minuman, kerajinan serta pakaian yang mendukung Indikator Kinerja Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif dengan nilai realisasi sebesar 175,97%
- 10) Telah dilaksanakan pengawasan kandungan bahan berbahaya terhadap produk kuliner UKM/IKM Binaan Provinsi DKI Jakarta kepada 653 UKM dengan jumlah sampel produk yang diuji sebanyak 893 sampel dan hasilnya 100% bebas kandungan bahan berbahaya. Namun, nilai realisasi Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya hanya sebesar 33,85%, hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran di tahun 2020 yang menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan sehingga berdampak pada tidak tercapainya target pengawasan. Dan hal ini menjadi akumulasi di tahun 2021 dimana target UKM kuliner yang harus dilakukan uji produk bahan berbahaya tidak seimbang dengan anggaran pembelian alat uji test kit sehingga nilai realisasi Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya tidak mencapai target.
- 11) Telah dilaksanakan kegiatan pelayanan pengujian produk industri dengan Standar SNI dengan nilai realisasi Indikator Kinerja sebesar 87,37%
- 12) Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional mencapai skala nilai 4 berdasarkan hasil serapan anggaran Program.

#### 4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel dibawah.

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	171,62%	93,16%	6,84%
2	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	665,53%	95,95%	4,05%
3	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	196,62%	98,81%	1,19%

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,62%	97,05%	2,95%

Dalam hal serapan anggaran, setiap Indikator Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM mencapai di atas 93% dengan tingkat efisiensi sekitar 1 s,d 6 % dan capaian kinerja nya di atas 100% seperti yang terlihat pada tabel di atas

**Program dan Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis Dinas PPKUKM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	pagu	realisasi	capaian
			satuan	target	Realisasi					
1	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	rupiah	212.009.400.000.000	363.850.000.000.000	171,62%	Program Pengembangan Ekspor	4.645.575.028	3.987.269.493	85,83%
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	6.519.007.644	6.319.488.106	96,94%
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	0,00%
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	149.760.000	144.975.000	96,80%
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.580.999.221	1.552.391.083	98,19%
							Program Pengembangan UMKM	137.087.000	136.745.000	99,75%
2	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	rupiah	244.401.000.000	1.626.555.796.924	665,53%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	27.029.289.259	25.933.680.955	95,95%
3	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	rupiah	134.471.200.000.000	264.400.000.000.000	196,62%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	21.764.275.270	21.504.822.458	98,81%
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	-
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91%	91,56%	100,62%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.249.891.880	20.704.329.084	97,43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	pagu	realisasi	capaian
			satuan	target	Realisasi					
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	155.023.518.235	150.370.557.121	97,00%
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	324.800.000	319.200.000	98,28%

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

#### 1. REALISASI ANGGARAN PER SKPD/UKPD DINAS PPKUKM TAHUN 2021

NO	SKPD/UKPD	APBD	APBD PERUBAHAN	REALISASI S.D 31 Desember 2021	PERSENTASE REALISASI TERHADAP APBD
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	181.172.414.856	142.100.515.744	138.537.855.979	97,49%
2	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	17.398.132.274	13.519.013.941	13.104.466.588	96,93%
3	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	13.105.445.737	8.911.152.035	8.570.661.349	96,18%
4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	16.156.188.781	10.850.259.526	10.491.488.668	96,69%
5	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	19.019.634.233	11.121.867.821	10.777.459.840	96,90%
6	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	21.986.082.325	16.873.325.812	16.386.018.449	97,11%

NO	SKPD/UKPD	APBD	APBD PERUBAHAN	REALISASI S.D 31 Desember 2021	PERSENTASE REALISASI TERHADAP APBDP
1	2	3	4	5	6 = 5/4
7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	4.885.785.062	2.212.932.235	2.118.625.665	95,74%
8	PUSAT DIKLAT PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	4.734.812.128	4.098.656.387	4.000.840.142	97,61%
9	UNIT PENGELOLA METROLOGI	8.166.521.943	7.662.211.213	7.127.890.199	93,03%
10	UPK PPUKMP PULOGADUNG	10.376.355.108	8.525.659.672	7.969.391.601	93,48%
11	UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	5.067.492.839	4.731.380.049	4.419.372.103	93,41%
12	UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	8.811.356.198	7.817.229.102	7.469.387.717	95,55%
<b>TOTAL</b>		<b>310.880.221.484</b>	<b>238.424.203.537</b>	<b>230.973.458.300</b>	<b>96,88%</b>

2. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2021

No	Program	APBD	APBDP	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Ekspor	7.269.844.328	4.645.575.028	3.987.269.493	85,83%
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	6.957.217.763	6.519.007.644	6.319.488.106	96,94%
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.790.705.070	-	-	-
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	149.760.000	149.760.000	144.975.000	96,80%
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.482.732.812	1.580.999.221	1.552.391.083	98,19%
6	Program Pengembangan UMKM	395.712.000	137.087.000	136.745.000	99,75%

No	Program	APBD	APBDP	Realisasi	Capaian
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	44.180.613.415	27.029.289.259	25.933.680.955	95,95%
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	44.327.108.227	21.764.275.270	21.504.822.458	98,81%
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	-	-
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.385.229.258	21.249.891.880	20.704.329.084	97,43%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	180.616.498.611	155.023.518.235	150.370.557.121	97,00%
12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	324.800.000	324.800.000	319.200.000	98,28%
<b>TOTAL</b>		<b>310.880.221.484</b>	<b>238.424.203.537</b>	<b>230.973.458.300</b>	<b>96,88%</b>

Penyerapan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM beserta Sudin dan UPT di Tahun 2021 sebesar 96,88%. Tingginya serapan anggaran tersebut karena adanya pandemi covid yang membuat anggaran dioptimalisasi atau difocusing, sehingga anggaran APBDP dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, masih ada beberapa Rincian Sub Kegiatan yang penyerapannya kurang dari 60%, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
  - a. RSK Pengawasan Produk SNI Wajib dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp 48.130.400 hanya terealisasi sebesar Rp 23.414.708 atau sebesar 48,65%. Hal ini disebabkan :
    - Harga di komponen lebih tinggi dari harga pasaran
    - Penyedia tidak dikenakan PPN karena Non PKP
    - Sebagian besar pelaku usaha menggratiskan biaya pengiriman pengujian SNI genteng, keramik, kloset duduk
  - b. RSK Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2014 untuk Kegiatan kegiatan pembebasan lahan untuk PKL di Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp 44.495.000 tidak dapat direalisasikan karena pihak penyedia sulit ditemui
  - c. RSK Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2014 untuk Kegiatan perencanaan pembebasan lahan untuk PKL di simprung dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp 44.495.000 tidak dapat direalisasikan karena pihak penyedia sulit

ditemui

- 2) Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Timur
  - a. RSK Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp 19.567.100 hanya terserap sebesar Rp 11.714.075 atau sebesar 59,87%. Pembayaran STNK dan pajak tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak STNK KDO nya
- 3) Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Utara
  - a. RSK Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 4.168.800 hanya terserap sebesar Rp 2.497.900 atau sebesar 59, 92%. Pembayaran STNK dan pajak tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak STNK KDO nya
- 4) Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Pusat
  - a. RSK Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Pusat dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 2.822.001 hanya terserap sebesar Rp 816.543 atau sebesar 28,93%. RSK ini terealisasi sesuai dengan tagihan.
  - b. RSK Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 9.815.960 hanya terserap sebesar Rp 2.852.100 atau sebesar 29,06%. Hal ini disebabkan ada 1 (satu) unit KDO roda dua yang tidak bisa direalisasikan karena tidak diketahui BPKB dan STNK nya dan akan segera dilakukan proses penerbitan ulang ke POLRES dan SAMSAT.
- 5) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik
  - a. RSK Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 36.507.000 hanya terserap sebesar Rp 18.606.000 atau sebesar 50,97%. RSK ini dilaksanakan secara virtual sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal
  - b. RSK Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 4.388.300 hanya terserap sebesar Rp 2.255.500 atau sebesar 50,71%. Pembayaran STNK dan pajak tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak STNK KDO nya
- 6) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil
  - a. RSK Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 7.170.600 hanya terserap Rp. 3.590.500 atau sebesar 50,07%. Pembayaran STNK dan pajak tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak STNK KDO nya
- 7) UPT Balai Metrologi Provinsi DKI Jakarta
  - a. RSK Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 180.073.683 hanya terserap Rp 102.552.367 atau

- sebesar 56,95%. RSK tersebut telah dilaksanakan dan dibayarkan sesuai tagihan
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2021 sebesar Rp. 14.780.000 hanya terserap Rp. 8.304.700 atau sebesar 56,19%. Hal ini dikarenakan pembayaran STNK dan pajak telah sesuai dengan jumlah pajak STNK Kendaraan Dinas Operasional nya

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Segala upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk mencapai sebuah visi yakni “Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Dalam mencapai visi tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah merencanakan dan melaksanakan 10 (sepuluh) program di APBDP 2021 yang meliputi:

1. Program Program Pengembangan Ekspor
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
10. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Beberapa Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Tercapainya Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan, sebanyak 70.665 wirausaha dari target 33.359, yang terdiri dari 23.762 IKM dan 46.903 UKM
- 2) Tercapainya Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta sebesar Rp. 363.850.000.000.000 dari target Rp. 212.009.400.000.000.
- 3) Tercapainya Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp. 1.626.555.796.924 dari target Rp. 244.401.000.000
- 4) Tercapaiannya Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB

ADHB Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 264.400.000.000.000 dari target Rp. 134.471.200.000.000.

- 5) Tercapainya Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 91,56% dari target sebesar 91%
- 6) Tercapainya pelaksanaan Rencana Aksi dari Kegiatan Strategis Daerah, dimana 9 (Sembilan) KSD dapat selesai 100% dan 2 (dua) KSD lainnya selesai 99,65% dan 95%
- 7) Tercapainya setiap Indikator Sasaran Khusus dan Indikator Sasaran Operasional
- 8) Tercapainya nilai ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta berdasarkan pelayanan SKA sebesar USD 38.966.277.235,81 dari target USD 4.208.117.493
- 9) Tercapainya pengawasan terhadap PKL dan pelaku usaha atas produk SNI, barang beredar, produk makanan dan minuman serta pengawasan terhadap alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) baik di pasar tradisional maupun modern sebanyak 22 pasar dari target 22 pasar.
- 10) Tercapainya persentase keluhan/ temuan konsumen yang ditindaklanjuti baik dari CRM maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebesar 100% dari target 100%.
- 11) Tercapainya Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri sebanyak 626 orang dari target 75 orang.
- 12) Tercapainya jumlah Koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK sebanyak 126 Koperasi dari target 120 Koperasi.
- 13) Tercapainya Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis sebanyak 4.800 orang dari target 70 orang.
- 14) Tercapainya jumlah ekspor di Tahun 2019 berdasarkan SKA sebesar USD 8.775.826.509,3.
- 15) Tercapainya persentase jumlah IKM yang berkualitas dengan nilai realisasi sebesar 22,58% dari target 15,47%
- 16) Tercapainya Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif dengan nilai realisasi sebesar 175,97% dari target 58,3%
- 17) Tercapainya Persentase produk industri dengan standar SNI dengan nilai realisasi sebesar 87,37% dari target 78%
- 18) Tercapainya Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional yang mencapai skala nilai 4 berdasarkan hasil serapan anggaran.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai maksimal adalah:

- 1) Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran di nol kan atau kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Indikator kinerja Program Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya tidak dapat terealisasi secara maksimal diakibatkan hal tersebut dimana hanya terealisasi sebesar 33,85% dari target 56,26%
- 2) Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dikarenakan pandemi covid sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak maksimal. Indikator Kinerja Program Persentase Cakupan alat UTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang tidak dapat terealisasi secara maksimal diakibatkan PPKM yang membatasi untuk pelaksanaan Sidang Tera Pasar sehingga hanya dapat terealisasi sebesar 78,38% dari target 99%
- 3) Masih banyak pelaku wirausaha baru yang belum memiliki usaha atau perijinan

### **Saran**

Dalam mengatasi beberapa permasalahan di atas, beberapa saran sebagai usulan langkah perbaikan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan bimtek dan pelatihan secara online
- 2) Pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder seperti perguruan tinggi, marketplace, lembaga, perusahaan, maupun perorangan dalam penumbuhan kewirausahaan industri baru, industri kreatif dan IKM yang berkualitas
- 3) Pelaksanaan bazar secara online.

Diharapkan untuk ke depannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai indikator kinerjanya baik Indikator Kinerja Sasaran maupun Indikator Kinerja Program .